



**LAPORAN KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI VI DPR RI
KE PERUM JASA TIRTA II JATILUHUR PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT
PADA MASA PERSIDANGAN II
TAHUN SIDANG 2023 – 2024
6 – 8 NOVEMBER 2023**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

2023

I. PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum

Mengacu kepada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (MD3), sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MD3, diatur bahwa DPR RI memiliki 3 (tiga) fungsi, yakni Fungsi Legislasi, Fungsi Anggaran dan Fungsi Pengawasan. Untuk menjalankan ketiga fungsi tersebut, dapat dilaksanakan melalui pelaksanaan kunjungan kerja, baik di dalam maupun ke luar negeri, sebagaimana diatur dalam Pasal 98 UU MD3.

Pelaksanaan Kunjungan Kerja Spesifik Pengawasan Kinerja dan Kontribusi BUMN ke Perum Jasa Tirta II Jatiluhur di Purwakarta Provinsi Jawa Barat didasarkan pada aturan pada Undang-Undang tersebut. Selain itu, pelaksanaan kunjungan ini juga didasarkan pada Keputusan Pimpinan DPR RI tentang Penugasan Anggota Komisi I s.d. XI DPR RI untuk melakukan Kunjungan Kerja pada Masa Persidangan I Tahun Sidang 2023 – 2024, dan Keputusan Rapat Internal Komisi VI DPR RI mengenai Sasaran dan Objek Kunjungan Kerja Komisi VI DPR RI dalam Masa Persidangan II Tahun Sidang 2023 - 2024.

B. Susunan Anggota Tim Kunjungan Kerja Komisi VI DPR RI

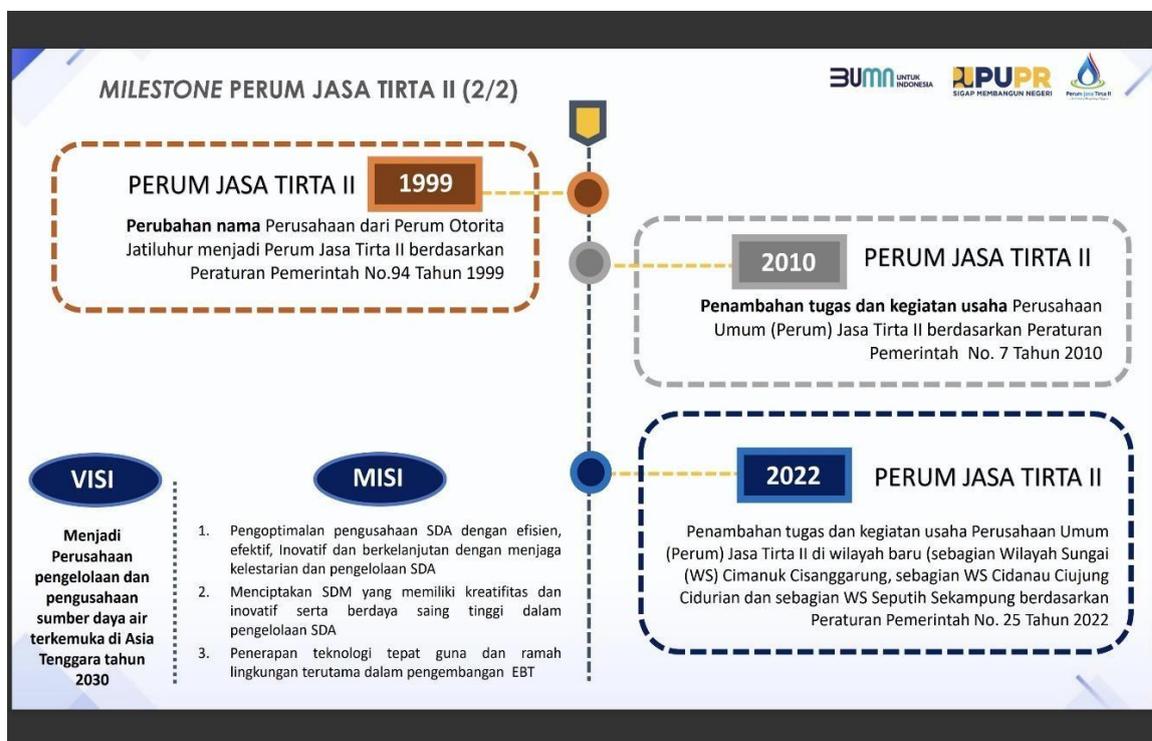
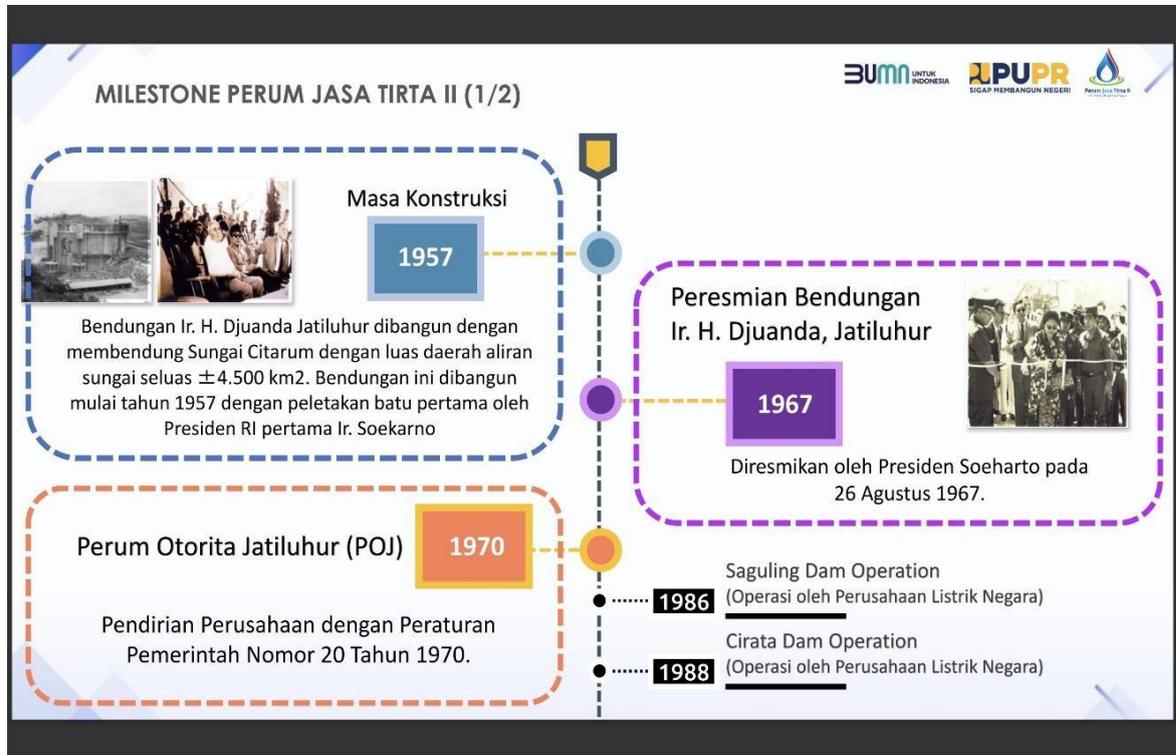
NO.	NO. ANGG.	N A M A	KETERANGAN
1.	A-352	MARTIN MANURUNG, S.E., M.A.	PIMP. / F-NASDEM
2.	A-65	ANDRE ROSIADE	F.P GERINDRA
3.	A-131	Ir. H. LA TINRO LA TUNRUNG	F.P GERINDRA
4.	A-96	MULAN JAMEELA	F.P GERINDRA
5.	A-20	LULUK NUR HAMIDAH, M.Si., M.P.A.	F.PKB
6.	A-544	Dr. Ir. E. HERMAN KHAERON, M.Si.	F.PD
7.	A-536	Hj. MELANI LEIMENA SUHARLI	F.PD
8.	A-409	RAFLY KANDE	F.PKS

II. INFORMASI DAN TEMUAN KUNJUNGAN KERJA

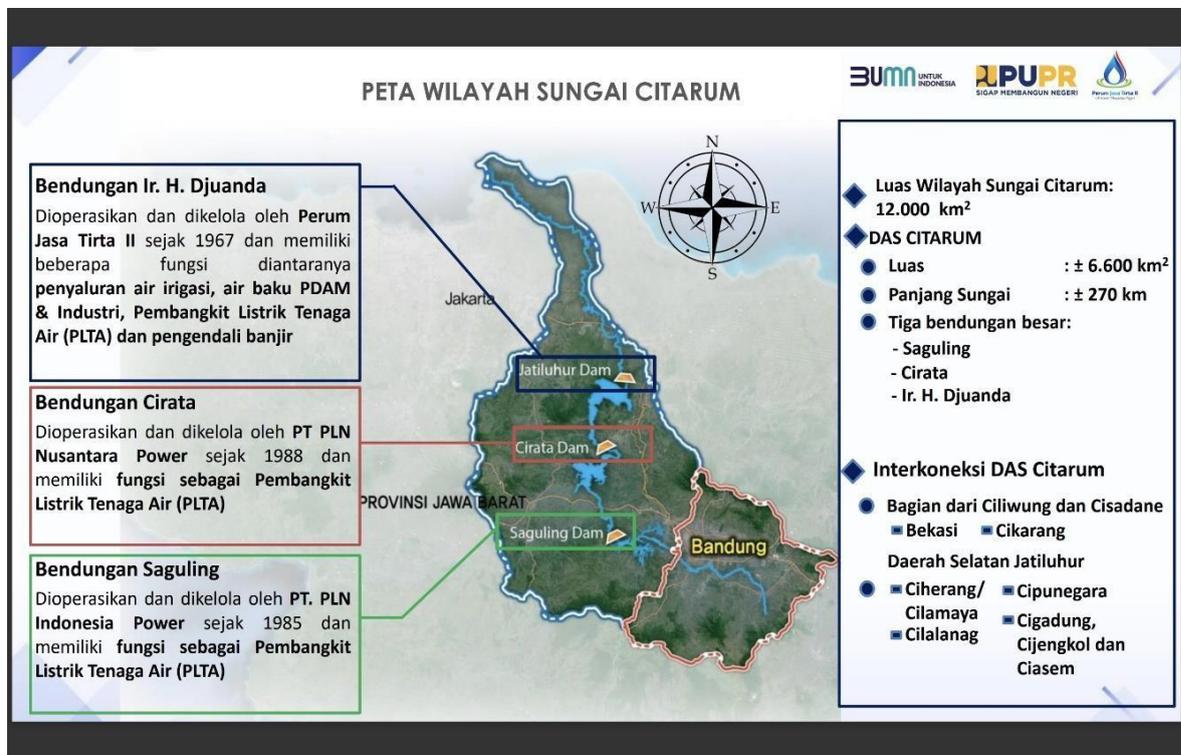
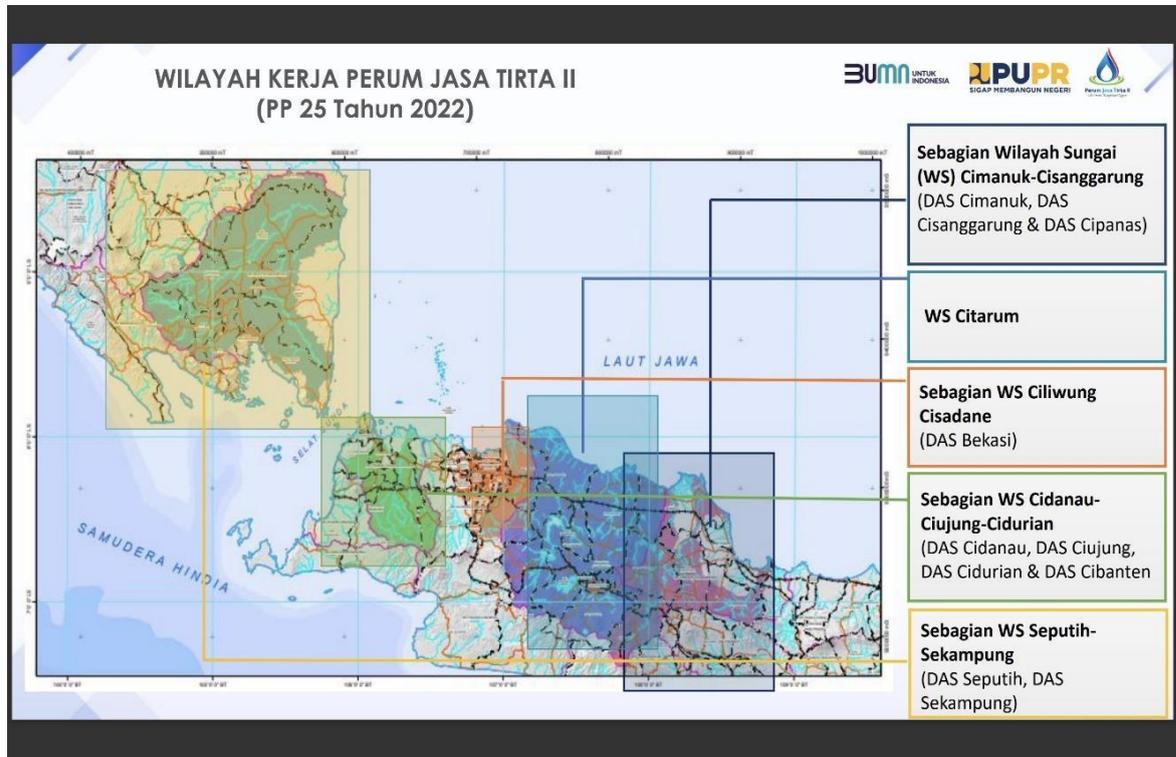
A. Perum Jasa Tirta II Jatiluhur

Daerah Aliran Sungai Citarum dikelola dengan Sistem Waduk Kaskade yang tersusun dari hulu ke hilir yaitu Waduk Saguling, Waduk Cirata dan Waduk Jatiluhur (Ir.

H. Djuanda), sehingga air keluar (limpasan) dari Waduk Saguling akan ditampung (diredam) oleh Waduk Cirata dan selanjutnya air keluar dari Waduk Cirata akan ditampung (diredam) oleh Waduk Jatiluhur sebelum mengalir ke hilir Sungai Citarum meliputi Kabupaten Karawang dan Kabupaten Bekasi.



Sistem Waduk Kaskade tersebut dikelola dengan Pola Operasi 3 Waduk yang disusun oleh Jasa Tirta II, PT. PLN Indonesia Power, PT. PLN Nusantara Power, BBWS Citarum, dan entitas lainnya yang terkait.



Saat ini kondisi tinggi muka air (TMA) Bendungan Ir. H. Djuanda pada tanggal 21 September 2023 pukul 07:00 berada di elevasi 94,36 mdpl dari garis batas operasi normal

93, 59 mdpl. Untuk ketersediaan air untuk kebutuhan layanan di bawah Waduk Jatiluhur, pendistribusian air baik saat musim kemarau atau musim hujan memiliki prinsip pemberian air secara efektif.

BENDUNGAN IR.H.DJUANDA




- Tipe Bendungan : Bendungan urugan batu dengan inti tanah liat miring
- Tinggi = 105 m pada pondasi terdalam
- Elevasi Atas Mercu Bendung = +114.50 mdpl
- Panjang Tubuh Bendungan = 1.2 km
- Tinggi Muka Air Normal +107 mdpl
- Kapasitas Volume Efektif = 2,4 Miliar m³
- Luas Genangan Normal = ± 83 km² / 8.300 ha

Per tanggal 7 November 2023:
 Tinggi Muka Air + 89.41 mdpl Volume efektif air yang tersedia = 997,44 juta m³



Flood Control
Pengendalian banjir untuk wilayah hilir (Karawang, Subang and Bekasi)



Power Generation
Pasokan listrik ke Jaringan Jawa Madura Bali

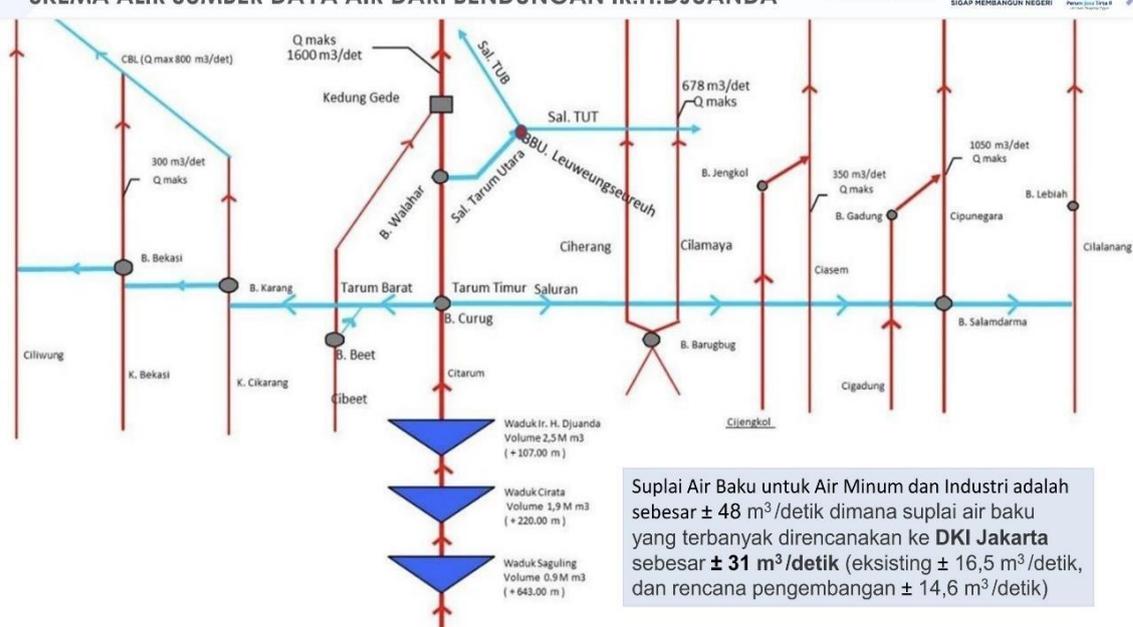


Raw Water Supply
Pemenuhan untuk perusahaan air minum dan industri



Water for Irrigation
Pemenuhan kebutuhan irigasi

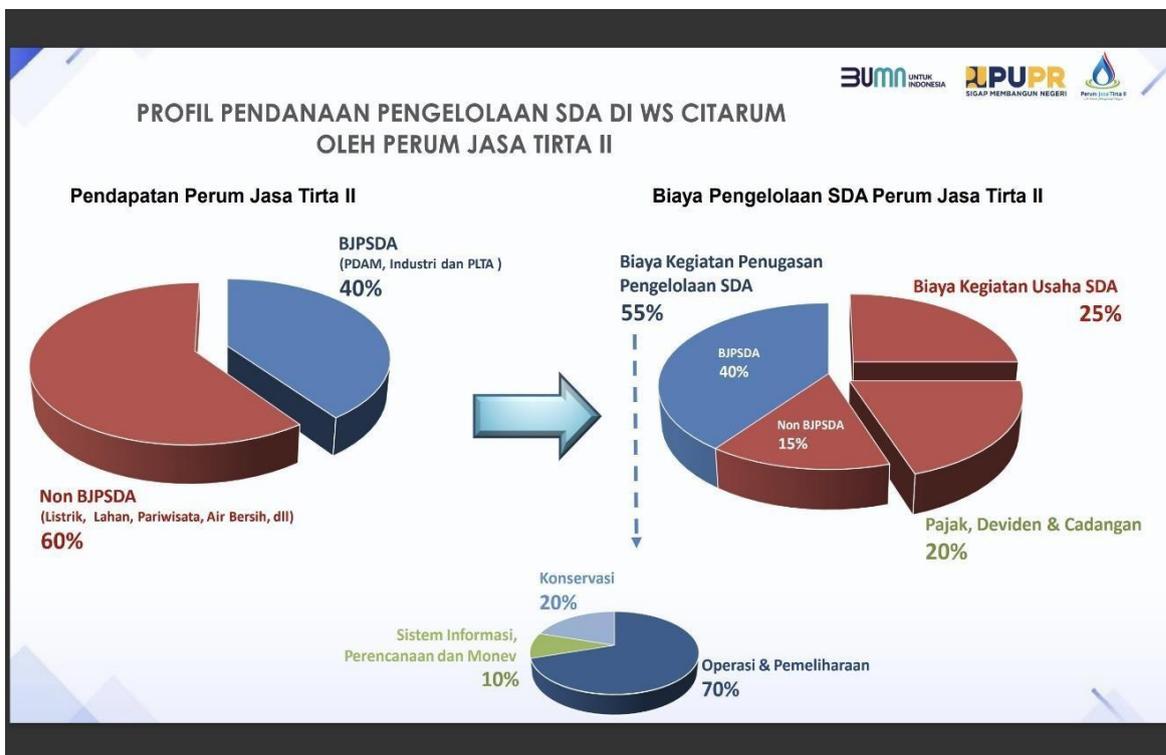
SKEMA ALIR SUMBER DAYA AIR DARI BENDUNGAN IR.H.DJUANDA



Suplai Air Baku untuk Air Minum dan Industri adalah sebesar ± 48 m³/detik dimana suplai air baku yang terbanyak direncanakan ke **DKI Jakarta** sebesar ± 31 m³/detik (eksisting ± 16,5 m³/detik, dan rencana pengembangan ± 14,6 m³/detik)

Kedisiplinan para petani ini yang mungkin jadi perlu effort lebih sehingga alokasi air yang diberikan bisa optimal. Petani bisa mendapatkan informasi jadwal giring gilir air dari

petugas di lapangan kemudian setiap kabupaten kota memiliki Komisi Irigasi yang biasanya selalu standby apabila dalam kondisi seperti ini.



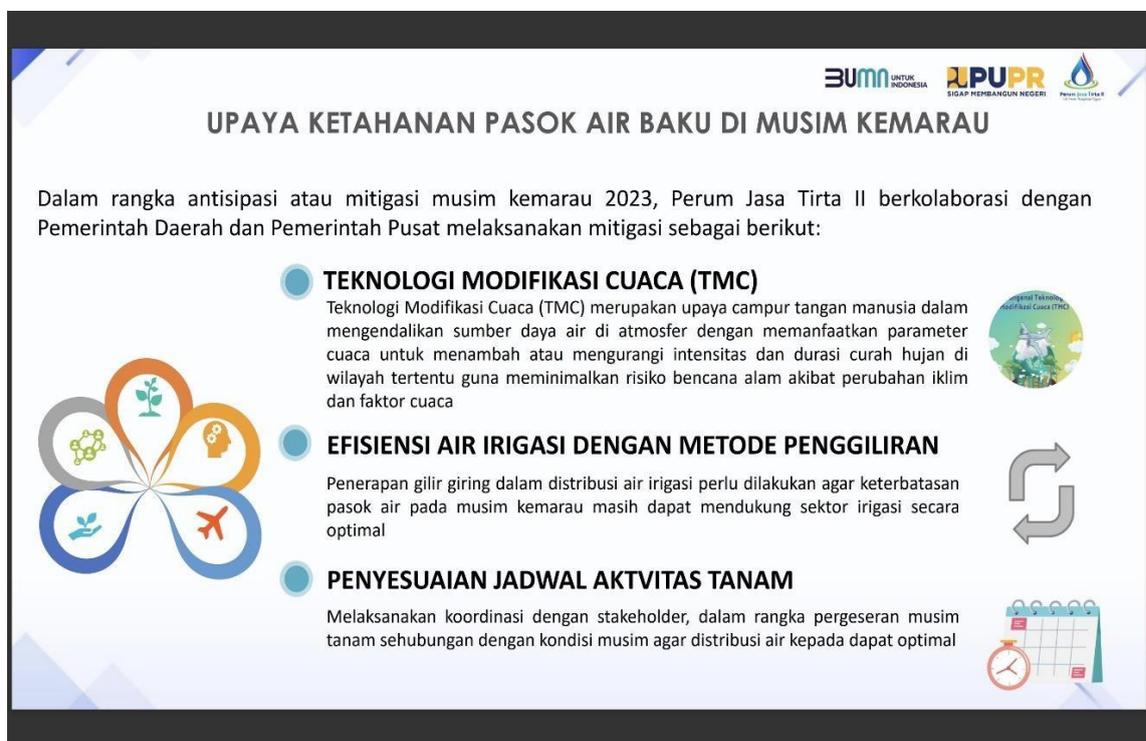
Pasokan air untuk irigasi air minum melalui pdam, dan industri dapat dipasok sampai akhir tahun 2023 dengan catatan semua pihak mematuhi kesepakatan alokasi air yang sudah disepakati bersama. Sedangkan apabila hujan belum kunjung turun, Jasa Tirta II

bersama PT. PLN Indonesia Power dan PT. PLN Nusantara Power, BBWS Citarum (Kementerian PUPR) dibantu BMKG, BRIN akan menyiapkan Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC).



TMC akan dilaksanakan untuk 30 hari operasi dan pelaksanaannya masih fleksibel apabila memang potensi awannya masih cukup tinggi dan kebutuhan air di 3 waduk

masih diperlukan tambahan. Dengan kesepakatan pola operasi yang sudah dioperasikan kepada para pemanfaat bisa dilaksanakan secara bersama-sama di lapangan. Dukungan dari para pemanfaat air sangat diperlukan agar menggunakan air secara optimal sampai di akhir tahun ini.



TEKNOLOGI MODIFIKASI CUACA (TMC)

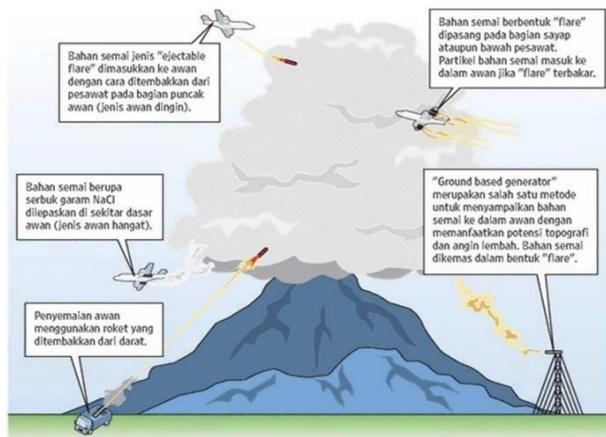
Press Esc to exit full screen

3UM UNLUK INDONESIA

PUPR SIGAP PEMBANGUN NEGERI



Perum Jasa Tirta II bersama pengelola Waduk Kasakde Citarum dan beberapa *stakeholder* terkait seperti BBWS Citarum, BHLK, BMKG, BRIN Dinas SDA Provinsi Jawa Barat melakukan Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) dengan dua metode yaitu *Ground Base Generator (GBG)* dan penyemaian awan dengan menggunakan pesawat



Sumber : www.bppt.go.id



EFISIENSI AIR IRIGASI DENGAN METODE PENGILIRAN

3UM UNLUK INDONESIA

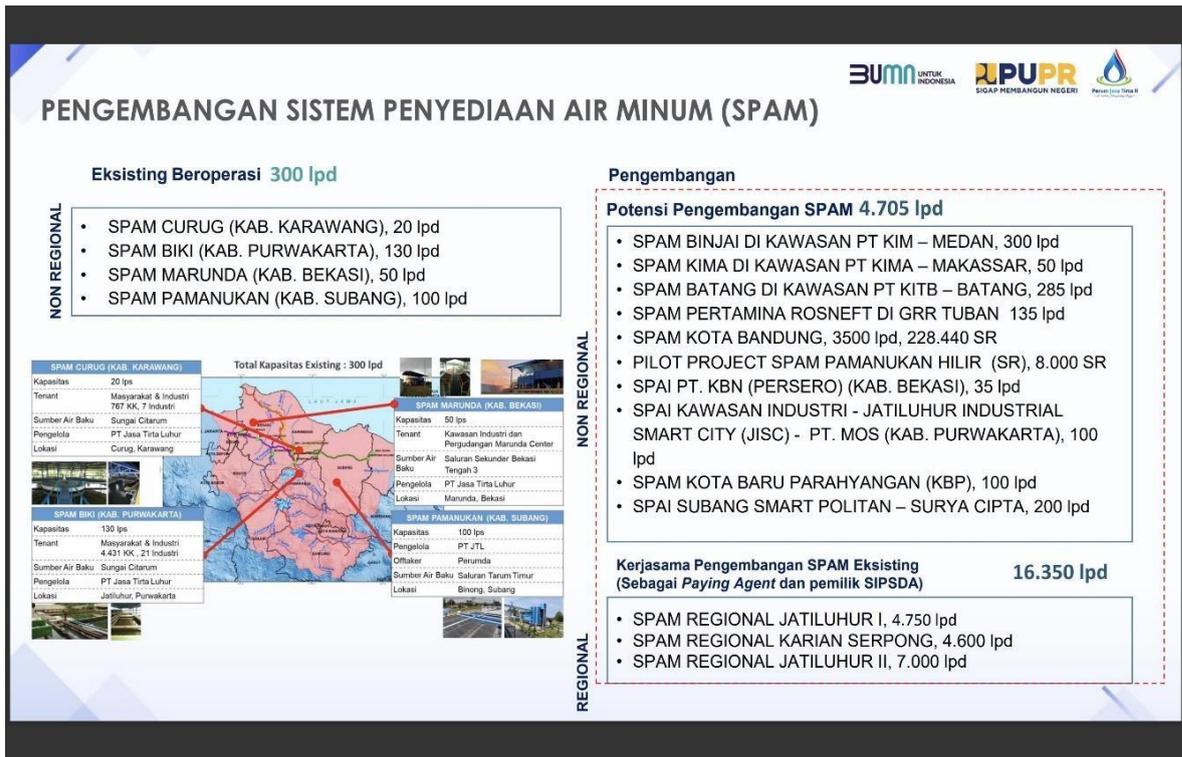
PUPR SIGAP PEMBANGUN NEGERI



Pemberian air secara bergilir dikenal dengan 3 (tiga) metode

- Gilir berselang, apabila air tersedia di sumber setempat antara 60% s.d 80 % dari kebutuhan irigasi
- Gilir glontor, apabila air tersedia di sumber setempat antara 40% s.d 60 % dari kebutuhan irigasi, dan sewaktu-waktu dilaksanakan gelontoran pada daerah-daerah kritis
- Gilir giring, apabila air tersedia di sumber setempat < 40 % dari kebutuhan irigasi.

Kegiatan pemberian air ini dilakukan dengan cara melaksanakan pengaturan pintu-pintu bangunan air dan merealisasikan pemberian air.



III. CATATAN DAN REKOMENDASI

Dari pertemuan yang dilakukan kepada jajaran Direksi Perum Jasa Tirta II Jatiluhur di Purwakarta Provinsi Jawa Barat pada saat pelaksanaan kunjungan kerja spesifik ini, ada beberapa catatan yang perlu menjadi perhatian mitra. Catatan tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

- Agar komposisi pasokan untuk masyarakat dan komersialisasi coba diperhitungkan kembali dalam rangka melakukan efisiensi dan pemenuhan keadilan untuk masyarakat.
- Perum Jasa Tirta II Jatiluhur dapat menjadi pionir dalam pengelolaan tanah dan air, sehingga dapat menangkap sumber-sumber pendanaan di luar negeri.
- Bendungan-bendungan milik pemerintah banyak dikelola oleh swasta, sebaiknya dikelola oleh pemerintah saja.
- Jika Perum Jasa Tirta II Jatiluhur ingin di scale up, agar dipertimbangan model seperti apa yang akan dikembangkan ke depannya.
- Persoalan pengelolaan air pada masyarakat agar dilakukan lebih

Dari berbagai data dan informasi, serta catatan yang diperoleh pada saat pelaksanaan kunjungan, ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian Komisi VI DPR RI, antara lain:

1. Komisi VI DPR RI mendorong agar seluruh pengelolaan tanah dan air dikelola oleh negara guna mendapatkan ketahanan dan kedaulatan bagi negara.
2. Komisi VI DPR RI meminta Perum Jasa Tirta II Jatiluhur di Purwakarta Provinsi Jawa Barat untuk meningkatkan kinerja korporasi, termasuk kondisi keuangan, serta meningkatkan daya saing terhadap industri air dan tanah di Indonesia.
3. Komisi VI DPR RI meminta Perum Jasa Tirta II Jatiluhur di Purwakarta Provinsi Jawa Barat untuk terus meningkatkan inovasi khususnya terkait industri air dan tanah, agar dapat bersaing pada tingkat global.
4. Komisi VI DPR RI tetap akan membawa kembali ke dalam rapat di DPR terkait permasalahan tanah dan air di Indonesia, khususnya untuk Perum Jasa Tirta I dan II meskipun telah mendapat penjelasan dan gambaran langsung dari direksi Perum Jasa Tirta II Jatiluhur di Purwakarta Provinsi Jawa Barat, mengingat perlunya mendapat perhatian dari Komisi VI DPR RI.

IV. DOKUMENTASI KEGIATAN











V. PENUTUP

Demikian laporan kunjungan kerja spesifik Komisi VI DPR RI dalam rangka Pengawasan Kinerja dan Kontribusi BUMN oleh Perum Jasa Tirta II Jatiluhur di Purwakarta Provinsi Jawa Barat, pada masa Persidangan II Tahun Sidang 2023 – 2024. Kami mengharapkan berbagai data dan informasi yang diperoleh dalam laporan ini dapat menjadi bahan pertimbangan serta ditindaklanjuti dalam rapat-rapat Komisi VI DPR RI.

Purwakarta, 8 November 2023
Ketua Tim Kunker Spesifik Komisi VI DPR RI
Ke Provinsi Jawa Barat

TTD

Martin Manurung, SE, MA

A – 352